

100% KERJA UNTUK KEJAR 100%

Kumpulan Kisah WASH Program untuk
Mendukung Tercapainya Universal Akses 2019



100% KERJA UNTUK KEJAR 100%

ISBN : 978-602-72978-2-1

Diterbitkan : Kelompok Kerja AMPL
Jl. Lembang No. 35, Menteng Jakarta - Indonesia 10310
Telp/fax (62-21) 31904113 / 31903909

Pengarah : Wahanudin (BAPPENAS); Aidan Cronin (UNICEF)

Editor : Aldy Mardikanto (BAPPENAS),
Putri Sortaria (Pokja AMPL Nasional),
Reza Hendrawan, Wildan Setiabudi, M. Zainal, M. Kurniawan (UNICEF)

Narasumber : I Dewa Bagus Adiyoga (Fasilitator Kelembagaan Provinsi Papua), Febriansyah Subagio (Fasilitator Kelembagaan Provinsi Papua Barat), Rini Septiani Baiq (Fasilitator Kelembagaan Provinsi Nusa Tenggara Barat), Wisnu Wardhana (Fasilitator Kelembagaan Provinsi Nusa Tenggara Timur), Sarviam Elvita Berry (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Sumba Timur), Victor Pati (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Sumba Timur), Aisyah Aga Ima (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Alor), Andi Bunga Tongeng (Fasilitator Kelembagaan Provinsi Sulawesi Selatan), Evelyn (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Takalar), Darwis (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Barru), Samri To Ngili (Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Luwu Utara).

Foto : Koleksi UNICEF dan dokumentasi Fasilitator Kelembagaan.

Penyusun : Rudy Yuwono.

PROGRAM WATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH)

Program Water Sanitation and Hygiene (WASH) merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF untuk mendukung peningkatan ketersediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Program ini berawal dari dukungan UNICEF terhadap bencana tsunami di Aceh tahun 2004, yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang dengan memperluas cakupan program ke daerah Indonesia Timur. Saat ini program WASH berlangsung di 5 provinsi Indonesia bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat. Pada tingkat kabupaten, program WASH dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu Jayapura (Papua), Luwu Utara, Takalar dan Barru (Sulawesi Selatan) dan Alor dan Sumba Timur (NTT). Melalui peningkatan ketersediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak, program WASH diharapkan dapat menurunkan angka penyakit diare dan balita dengan tubuh kerdil (stunting), yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Program WASH dukungan UNICEF terdiri dari dua komponen, yaitu 1) WASH in Community, atau peningkatan akses air dan sanitasi di masyarakat melalui pendekatan STBM, dan 2) WASH in Institution, atau peningkatan akses air dan sanitasi di Sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Melalui dukungan Bill Gates and Melinda Fund, di tiap wilayah kerjanya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, program WASH melibatkan seorang Fasilitator Kelembagaan. Tugasnya antara lain termasuk membantu pemerintah setempat dalam menyusun rencana, koordinasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan promosi perilaku sanitasi sesuai dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam kesehariannya, program WASH berada di bawah koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional.

Tulisan yang disajikan adalah dokumentasi pengalaman dan pandangan para narasumber yang tidak mewakili pandangan organisasi dimana narasumber bekerja.

KATA PENGANTAR

FOREWORD

Pada saat buku ini diterbitkan, setidaknya hanya tersisa waktu dua tahun bagi Indonesia untuk mencapai target besar Universal Access air minum dan sanitasi pada 2019 mendatang. Sebagaimana juga tercantum di dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia telah menetapkan pada tahun tersebut semua masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan harus sudah mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak. Target tersebut sekarang umum dikenal sebagai target 100 – 0 – 100 yang artinya adalah 100% akses layanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses layanan sanitasi.

At the time of this book being published, there are only two years left to 2019; the year that Indonesia has committed to reach the target of Universal Access to drinking water and sanitation. The Mid Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019 also reaffirms Indonesia's commitment that by 2019 all the population, whether rural or urban, will have access to drinking water and sanitation services. The target is now commonly referred to as 100-0-100 which means that 100% of the population have access to drinking water, there are 0% slum areas and 100% have access to sanitation.

Pencapaian target 100 – 0 – 100 memang bukan hal mudah sehingga membutuhkan komitmen dan upaya luar biasa dari semua pihak terlibat. Apalagi, sesuai data Susenas 2016, capaian sanitasi Indonesia masih di angka 76,37% dan air minum di angka 71,14%. Pencapaian target ini tentu membutuhkan upaya dan inovasi luar biasa dari para pelaku-pelaku pembangunan sanitasi di segala tingkatan. Termasuk juga upaya dan inovasi dari para pelaku-pelaku lapangan yang berperan sebagai motor penggerak masyarakat dalam program program peningkatan akses sanitasi dan air minum di berbagai daerah.

Achieving the 100-0-100 target will not be an easy task and will require an extraordinary commitment and effort from all stakeholders. According to data from the National socio-economic survey, SUSENAS 2016, access to sanitation in Indonesia remains at only 76.37% while access to drinking water is currently lies at 71.1%. This effort and innovation must come from all of the drinking water and sanitation development actors across all levels, including those working at field level on mobilizing communities across all of the various regions of the country.

Semua harus 100% bekerja keras dan bekerja sama guna mempercepat pencapaian target akses air minum dan sanitasi 100% tersebut. Untuk itu, pemerintah. Indonesia bekerja sama dengan banyak mitra-mitra pembangunan dalam dan luar negeri, salah satunya adalah dengan the *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) melalui program *Water, Sanitation and Hygiene* (WASH) di wilayah Indonesia Timur. Program WASH berfokus dalam pembangunan sanitasi melalui pelaksanaan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mengubah perilaku dan kebiasaan buang air besar (BAB) masyarakat di desa-desa. Tidak lagi BAB di kebun, selokan atau kali, mereka sekarang sudah mau untuk BAB di jamban.

Everyone needs to put in 100% hard work and collaboration to accelerate the achievement of the goal of 100% access to drinking water and sanitation. The Government of Indonesia works with several local and international development partners to accelerate sanitation, including UNICEF, the United Nations Children’s Fund, through the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) program. This partnership has

field level programs in eastern Indonesia. The WASH program focuses on sanitation development through the support of the Community-Based Total Sanitation approach (STBM) to change community behavior and to eliminate open defecation (OD) in communities. Open Defecation Free (ODF) means all of the people in the community are willing to stop open defecating in the river, ditch, in the field etc. and to use a toilet.

Pencapaian program WASH ini tentu tidak lepas dari langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah masing-masing dalam mendorong pembangunan air minum dan sanitasi. Di balik itu juga ada peran para Fasilitator Kelembagaan WASH atau mereka yang ditugaskan untuk melakukan advokasi dan koordinasi kelangsungan program di wilayah kerjanya masing-masing. Bersama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya, mereka berupaya mendorong terjadinya berbagai inovasi dan terobosan dalam menjalankan pendekatan STBM dan program pembangunan air minum dan sanitasi lainnya. Mereka juga harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf pemerintah daerah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Selain itu, sebagai pekerja program, mereka harus melakukan monitoring dan evaluasi kelangsungan program.

The achievements of the WASH program are certainly in line with the strategic steps undertaken by each local government in encouraging the development of community access to drinking water and sanitation. An important element is the role of WASH Institutional Facilitators who advocate for and support the coordination of the STBM program in their respective areas. Together with local governments and other partners, they encourage innovation in the implementation of the STBM program and support all of the various sanitation and water development programs. They also aim to increase the knowledge, skills and capacity of local government staff and partners. An additional important role they play in support of the program is to monitor and evaluate the quality and continuity of the STBM program.

Banyak pengalaman bagus yang didapat oleh para Fasilitator Kelembagaan program WASH yang telah berhasil membuka sekat birokrasi, menjalin kolaborasi, hingga mampu meyakinkan masyarakat untuk mengubah kebiasaan sanitasinya. Bahkan ada pengalaman yang menunjukkan bahwa pada akhirnya masyarakat mau terlibat aktif untuk mempromosikan perilaku sanitasi ke masyarakat lainnya.

These Institutional Facilitators have learnt many important and valuable lessons as part of the WASH program support to STBM. They have successfully navigated bureaucratic barriers, established collaboration mechanisms between partners and have helped to convince communities to change their sanitation habits. There are many positive examples that have led to the community themselves becoming actively involved in the ODF initiatives.

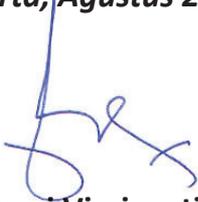
Buku 100% Kerja untuk Kejar 100% ini merupakan kompilasi dari pengalaman-pengalaman terbaik dari banyak pengalaman dan hasil kerja mereka yang sekiranya dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi pekerja-pekerja program sejenis. Susunannya dibuat sesuai dengan topik-topik pembelajaran yang perlu diketahui oleh para pekerja program sejenis lainnya, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Mulai dari pembelajaran tentang pentingnya kepemimpinan, perencanaan, koordinasi, kebijakan, pemantauan, pembiayaan sampai pembelajaran tentang pengembangan kapasitas.

Akhir kata, semoga buku ini menambah pengetahuan pembaca, dan mendukung percepatan peningkatan akses air dan sanitasi serta menginspirasi pelaku pembangunan lain di sektor air minum dan sanitasi maupun di sektor lainnya.

The publication of this book '100% Work to Achieve 100% Access' is a compilation of some of the best practices from the field that can be used as an inspiration and a reference for similar initiatives in other parts of the country in order to encourage replication and acceleration of sanitation programs. This publication is structured around key learning topics that other sanitation practitioners should know, especially around creating an enabling environment and stronger systems for the

water and sanitation sector. The learning covers the important areas of leadership, planning, coordination, policy, monitoring, financing and capacity building. Finally, we hope this book will help to share programmatic learning and knowledge among sector professionals to push further acceleration of water and sanitation access, as well as to inspire practitioners and implementers not only in the drinking water and sanitation sector but also in other development sectors.

Jakarta, Agustus 2017



Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM

Direktur Perkotaan,
Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas



Gunilla Olsson

Perwakilan UNICEF
di Indonesia

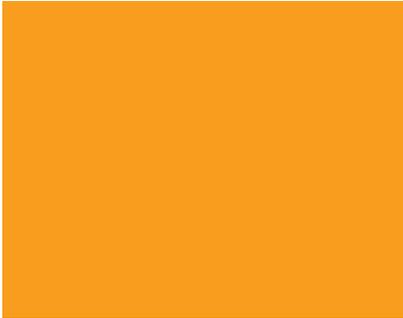
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ISI.....	vi
PENDAHULUAN	xi
KEPEMIMPINAN	1
• TIAP PEMIMPIN PUNYA CARANYA SENDIRI	2
• JIKA MEREKA BICARA, MASYARAKAT DENGAR	6
PERENCANAAN	11
• FORMALISASI RENSTRA AGAR ADA TINDAK LANJUT	12
• MENDORONG PERENCANAAN DENGAN DATA KINERJA STBM.....	16
KOORDINASI	21
• KOMUNIKASI, SINKRONISASI, LALU SINERGI	22
• SUDAH SELAYAKNYA, SANITARIAN DILIBATKAN	28
KEBIJAKAN	35
• MEMANFAATKAN MOMENTUM KEBIJAKAN BARU	36
• MENGAITKAN KE URUSAN DAN KEBIJAKAN LAIN	40
PEMANTAUAN	45
• LEBIH EFEKTIF LIBATKAN WARGA DALAM MONEV	46
• MENYIAPKAN DATA BASELINE UNTUK DIPAKAI BERSAMA.....	50
• PAKAI TEKNOLOGI MAJU UNTUK KELOLA DATA	53
PEMBIAYAAN	57
• EVALUASI BELANJA DENGAN PERANGKAT YANG TEPAT	58
• STRATEGI ADVOKASI TEPAT, MASALAH ANGGARAN TERATASI	63

PENGEMBANGAN KAPASITAS	67
• DIDATANGI LANGSUNG AGAR MAU BERUBAH.....	68
• VERIFIKASI DAN DEKLARASI UNTUK NAIKKAN MOTIVASI	72
• KESADARAN TUMBUH, PELUANG USAHA TUMBUH.....	76
PENUTUP	81
• ADA PERAN FASILITATOR UNTUK MENDORONG KEBERHASILAN	82



PENDAHULUAN



Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target akses universal pada Tahun 2019. Target nasional yang biasa disebut dengan istilah 100 – 0 – 100 ini memiliki makna pemenuhan akses layanan air minum 100%, kawasan kumuh 0%, dan akses layanan sanitasi yang layak 100%. Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, tidak sedikit Pemda yang tidak siap dalam mengupayakan terwujudnya akses universal. Hal ini karena pengelolaan pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang tidak optimal. Misalnya, tidak adanya wadah koordinasi antar pelaku pembangunan AMPL. Kalaupun ada, forum koordinasi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, air dan sanitasi terkadang tidak menjadi prioritas dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Penyebabnya bisa jadi indikator akses air dan sanitasi tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Penyebab yang lain adalah tidak adanya kebijakan dan regulasi untuk mendorong sektor AMPL sebagai prioritas. Isu pemantauan dan lemahnya sumber daya manusia juga berkontribusi pada kinerja pembangunan AMPL. Terakhir, absennya kepemimpinan dan komitmen yang kuat akan menghambat pencapaian target universal akses.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan AMPL. Salah satunya ialah dengan menempatkan pendamping penguatan pengelolaan pembangunan AMPL atau yang biasa disebut sebagai Fasilitator Kelembagaan AMPL. Fasilitator Kelembagaan bertugas melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, misalnya dengan mendorong individu-individu di pemerintahan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk menjadi penggerak pembangunan AMPL. Fasilitator kelembagaan turut menjadi jembatan penghubung komunikasi antar pelaku pembangunan AMPL, sehingga dapat mengikis sekat birokrasi yang kaku dan akhirnya koordinasi dapat berjalan dengan lebih lancar. Selain itu Fasilitator Kelembagaan juga bertugas mendampingi penyusunan dokumen **perencanaan** disertai dengan produk **kebijakan dan regulasi** sebagai dasar pemberian prioritas pada **pembiayaan** pembangunan sektor AMPL. Yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat sistem **pemantauan** yang didukung oleh **kapasitas sumber daya manusia yang memadai**.

Buku 100% Kerja untuk Kejar 100% ini menceritakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Fasilitator Kelembagaan dalam mendampingi peningkatan kinerja Pembangunan AMPL di daerah. Misalnya ada pengalaman yang menginspirasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang bagaimana Kelompok Kerja (Pokja) AMPL dimanfaatkan bukan saja sebagai wadah koordinasi bagi berbagai *stakeholder*, tetapi juga untuk bersinergi dan berkolaborasi. Ada pula pengalaman dari Provinsi Papua tentang inovasi lokal yang menjadikan dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya advokasi Fasilitator Kelembagaan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah melalui penyusunan kebijakan, seperti Peraturan Bupati, juga terdokumentasi dalam buku ini.

Semua pengalaman yang menginspirasi ini dikemas dalam enam elemen Penciptaan Lingkungan yang Kondusif atau biasa dikenal dengan istilah *Enabling Environment*, yaitu: (1) kepemimpinan, (2) perencanaan, (3) koordinasi, (3) kebijakan, (4) pemantauan, (5) pembiayaan dan (6) peningkatan kapasitas. Berdasarkan definisinya, *enabling environment* dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang saling berkaitan, yang memungkinkan dan memampukan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk terlibat didalam pemenuhan kebutuhan dasar, akses pada air minum dan sanitasi, yang berkelanjutan. Dengan kata lain, apabila enam komponen tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan berfungsi secara optimal, maka dapat menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya universal access.

Kerja-kerja yang dilakukan oleh Fasilitator Kelembagaan memang lebih banyak menciptakan kondisi yang mendukung dan memampukan sehingga berhasil meningkatkan kinerja pembangunan AMPL, khususnya sanitasi dasar, di daerahnya masing-masing. Mereka tidak saja berhasil membuka sekat birokrasi, menjalin kolaborasi, namun kerja-kerja mereka juga memiliki dampak hingga tingkat masyarakat. Dalam melakukan tugasnya, Fasilitator Kelembagaan dituntut untuk lihai mengatasi tantangan dan cermat melihat peluang. Kemampuan Fasilitator untuk berkomunikasi juga menjadi penting, karena yang didampingi sangat bervariasi, mulai dari masyarakat, pemuka agama, sampai dengan pejabat pemerintah di daerah. Dokumentasi kerja-kerja Fasilitator Kelembagaan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memampukan inilah yang disajikan dalam buku 100% Kerja untuk Kejar 100% ini.



KEPEMIMPINAN

TIAP PEMIMPIN PUNYA CARANYA SENDIRI

Keterlibatan kepala pemerintahan setempat dalam perbaikan perilaku sanitasi di wilayahnya dapat membawa banyak manfaat. Berbekal jiwa kepemimpinan dan kepedulian kuat terhadap permasalahan sanitasi, seorang kepala pemerintahan dapat menginspirasi dan mempengaruhi perubahan masyarakatnya dengan lebih efektif. Bermodalkan kewenangan politiknya, dia dapat meminta instansi-instansi dan pihak-pihak berkepentingan di wilayahnya untuk saling bekerjasama memperbaiki perilaku sanitasi masyarakat. Dia dapat menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya berikut anggaran pelaksanaannya.

Banyak gubernur, bupati, walikota, camat, lurah dan kepala desa yang sudah terlibat dalam upaya perbaikan kondisi sanitasi di wilayahnya. Beberapa bahkan turun langsung mengikuti kegiatan-kegiatan dengan masyarakatnya, khususnya mereka yang ada di tingkatan kecamatan dan kelurahan atau desa. Dengan caranya sendiri, mereka mendekati masyarakatnya dan mengatur kerjasama lembaga-lembaga yang dia miliki. Tidak selalu semuanya harus melalui cara dan jalur formal.



Bagi Charlly Fischer menjadi relawan STBM adalah amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Niat tulusnya pun berbuah manis, berkat ketekunan dan inovasi yang dilakukannya, kini Charlly pun sukses mengajak seluruh masyarakat di tujuh kelurahan di Kecamatan Soppeng untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahkan, dua desa diantaranya sudah berhasil melakukan deklarasi STOP BABS. Dalam foto ini tampak Charlly Fischer (berbaju hijau tua) bersama dengan aparat keamanan terjun langsung diantara masyarakat yang sedang membangun jamban sederhana secara swadaya (Sumber foto: UNICEF)

Sehari-hari memimpin Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Charlly Fischer terpanggil untuk memerankan dirinya sebagai relawan sanitasi. Charlly berhasil menggerakkan Karang Taruna, Kelompok PKK, Majelis Taklim, aparat BABINSA, Kelompok Tani dan Kelompok Peternakan di kecamatannya untuk menjalankan program STBM. Semua diajak berdiskusi oleh Charlly guna mendukung program tersebut. Tempat diskusinya tidak harus di ruang-ruang rapat kecamatan, berdiskusi di warung kopi juga dijalankan oleh Charlly. Dengan gaya informal demikian, Charlly berhasil menyelaraskan program STBM dengan program-program lainnya, termasuk dengan program kader desa.



Keberhasilan dari Kecamatan KAHALI untuk mendeklarasikan status Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tidak lepas dari dukungan camatnya yang memahami bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan kelangsungan Program Kecamatan KAHALI BERHIAS. Kecamatan KAHALI menjadi satu – satunya kecamatan SBS se-Kabupaten Sumba Timur. (Sumber foto: UNICEF)

Kecamatan Katala Hamu Lingu (KAHALI) merupakan kecamatan pertama di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan Deklarasi Stop BABS pada Nopember 2015. Keberhasilan itu tidak lepas dari kepemimpinan sang camat KAHALI, yaitu Thomas Peka Rihi. Pendekatan adat diterapkan oleh Thomas. Masyarakat diajak untuk melakukan sumpah adat demi mempertahankan statusnya sebagai kecamatan SBS. Sumpah adat yang dilakukan saat Deklarasi SBS Sekecamatan KAHALI di bulan November 2014 ini ditandai dengan pemotongan hewan sebagai tanda bahwa sumpah ini disaksikan oleh arwah leluhur.



Libatkan para pemimpin pemerintahan di tiap wilayah kerja untuk ikut mempromosikan perilaku sanitasi. Mereka sangat memahami karakteristik masyarakatnya, oleh karena itu biarkan mereka bekerja sesuai caranya masing-masing.

Keikutsertaan para pemimpin di atas umumnya tidak terjadi dengan sendirinya. Di beberapa daerah, seorang fasilitator perlu meyakinkan seorang pemimpin tentang manfaat dari program peningkatan perilaku sanitasi bagi masyarakat di wilayahnya. Di awal keterlibatannya, camat Charlly banyak berdiskusi dengan fasilitator yang ditugaskan di Kabupaten Barru, yaitu Darwis. Demikian juga dengan camat Thomas yang di awal keterlibatannya banyak berdiskusi dengan Sarviam Elvita Berry atau yang biasa dipanggil Ita, Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Sumba Timur. Baik Darwis maupun Ita menyadari bahwa keterlibatan camat di wilayah kerjanya sangat penting untuk kelangsungan programnya. Oleh karena itu, mereka selalu siap untuk mendampingi camat-camatnya saat melakukan kegiatan-kegiatan promosi sanitasi. Bukan kebetulan jika kemudian Charlly dan Thomas semakin percaya diri untuk menerapkan cara pendekatannya sendiri ke warganya masing-masing.

JIKA MEREKA BICARA, MASYARAKAT DENGAR

Masyarakat Indonesia tergolong agamis. Pendapat dan saran dari tokoh-tokoh agama sangat didengar. Ajakan dari tokoh agama diyakini sebagai ajakan yang akan membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih berkualitas. Dilibatkannya tokoh agama untuk mempromosikan perilaku sanitasi terbukti efektif, apalagi jika pesan-pesan promosinya disampaikan dalam acara-acara keagamaan. Rentang pendengarnya sangat luas. Anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan, baik pejabat maupun pengusaha, semua hadir dalam acara-acara keagamaan.

Contoh kerjasama dengan tokoh agama dapat dijumpai di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajakan program WASH untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan promosi sanitasi disambut baik oleh Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) di bulan Mei 2014. Mereka berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah setempat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk

menggugah perubahan perilaku jemaat dan masyarakat agar mau menggunakan jamban yang layak. Selain membangkitkan kesadaran jemaatnya, para tokoh agama juga siap memberikan pendampingan pastoral kepada jemaatnya dan mencontohkan penggunaan jamban yang layak.



Lokakarya diadakan di bulan September 2014 untuk memantapkan keterlibatan Sinode GKS, termasuk untuk menyusun materi penyuluhan perilaku sanitasi dalam bahan khotbah yang disampaikan oleh para pendeta dan bahan pengajaran minggu. Setelah diuji-cobakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, bahan khotbah difinalisasi oleh Tim Penyusun yang terdiri dari 5 orang pendeta dari berbagai klasis di Kabupaten Sumba Timur. (Sumber foto: UNICEF)

Berbagai kegiatan persiapan dilakukan sebelum para tokoh agama dan anggota Sinode GKS menjalankan misinya. Pemahaman mereka ditingkatkan, khususnya menyangkut isu sanitasi dan dampaknya bagi kesehatan diri dan lingkungan serta nutrisi anak. Pesan-pesan kunci terkait promosi sanitasi disusun sesuai dengan argumen-argumen Alkitab. Strategi dan rencana komunikasi yang berbasis gerejawi disepakati, tidak hanya untuk jemaat dewasa tapi juga untuk anak-anak yang akan disampaikan dalam Sekolah Minggu.

Materi khotbah dan materi pengajaran Sekolah Minggu disusun bersama oleh perwakilan Sinode GKS dengan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Beberapa pesan penting dalam materi khotbah tersebut antara lain adalah:

- Semua ciptaan adalah merupakan cerminan keagungan dan kemuliaan Allah dan karena itu semuanya berharga,
- Hidup sehat merupakan wujud kasih kepada sesama,
- Kesehatan lingkungan sebagai tanggung jawab iman.

“ *Tokoh agama memiliki pengaruh sampai ke para pengambil kebijakan. Dukunglah kegiatan mereka agar mereka dapat mempromosikan perilaku sanitasi dengan lebih intensif dan efektif.* ”

Pesan-pesan sama juga disampaikan dalam berbagai materi komunikasi yang disebarluaskan ke para pendeta Sinode GKS. Sedangkan materi pengajaran Sekolah Minggu memuat pesan-pesan terkait penggunaan WC, cuci tangan dengan sabun, kebersihan makanan dan minuman, serta kebersihan lingkungan. Keterlibatan Sinode GKS tidak berhenti hanya di penyampaian khotbah saja. Banyak yang mereka rencanakan dan akan segera direalisasikan. Misalnya, rencana untuk mengupayakan adanya WC di 700 fasilitas GKS, gotong royong membangun jamban bagi keluarga tidak mampu, sekretariat STBM tersendiri di Sinode GKS, pelatihan pemicuan untuk guru-guru Sekolah Minggu dan festival anak-anak yang disertai dengan praktek cuci tangan pakai sabun. Selain itu semua, GKS akan memastikan agar sidang-sidang Gerejawi (sinode, klasis dan jemaat) senantiasa memasukkan pesan-pesan STBM dalam acara-acaranya.

Sebagaimana di Sumba Timur, tokoh agama juga dihormati di daerah-daerah lain di Indonesia. Masyarakat sangat menghargai ucapan mereka sehingga keterlibatan mereka untuk mempromosikan sanitasi dapat memberikan hasil yang luar biasa. Dengan jaringan kerjanya yang luas, mereka mampu mengerahkan banyak sumber daya dan mempengaruhi banyak pihak. Sudah menjadi tugas fasilitator untuk mengidentifikasi tokoh atau kelompok agama yang dapat diajak bekerjasama. Sebagaimana dilakukan Fasilitator Kelembagaan di Sumba Timur, Sarviam Elvita Berry, yang memberikan pendampingan untuk memastikan bahwa para tokoh agama tersebut memiliki pemahaman dan bekal yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan promosi sanitasi.

Kerjasama dengan lembaga agama juga sudah dilakukan di tingkat nasional. Pada bulan Januari 2017, BAPPENAS menandatangani Nota Kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak dan sedekah dengan program pemerintah dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015. Selain menguraikan sinergi pendayagunaan tersebut, Fatwa MUI tersebut juga menekankan perlunya perubahan perilaku masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan air minum dan sanitasi saat ini.

A large, faint lightbulb graphic is centered on the page. Inside the lightbulb, there are several circular icons representing different aspects of water and sanitation: a hand sanitizer bottle, a recycling symbol, a water tap with hands being washed, a water drop, a toilet, a person sitting on a toilet, a person standing, and a recycling symbol. The word "PERENCANAAN" is written in large, bold, white capital letters across the middle of the lightbulb.

PERENCANAAN

FORMALISASI RENSTRA AGAR ADA TINDAK LANJUT

Mengingat status formalnya yang belum ada, Rencana Strategis Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) seringkali tidak ada yang menindaklanjuti. Instansi-instansi yang terlibat dalam proses penyusunannya seolah-olah tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam renstra tersebut. Guna mengatasi masalah itu, Renstra AMPL harus dikaitkan dengan produk yang dikenal dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Atau dilegalkan sebagai suatu peraturan pimpinan daerah. Peran Fasilitator Kelembagaan sangat penting untuk memulai dan memelihara kelangsungan proses formalisasi renstra tersebut.

■ itulah tantangan yang dihadapi I Dewa Bagus Adiyoga, Fasilitator Kelembagaan program WASH di Provinsi Papua. Salah satu tugasnya di tahun 2013 adalah mendampingi proses formalisasi Renstra AMPL yang baru disusun ulang. Dokumen Renstra AMPL yang lama sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi. Walau disusun oleh instansi-instansi provinsi bersama pihak-pihak berkepentingan lainnya, dokumen tersebut sayangnya tidak pernah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan mereka masing-masing. Mengingat Renstra AMPL tidak memiliki kedudukan formal dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, tidak ada tuntutan bagi mereka untuk menggunakannya.



Pertemuan Revitalisasi Kelompok Kerja AMPL Provinsi Papua dilaksanakan pada Bulan Februari 2017. Selain untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, pertemuan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pembangunan AMPL. (Sumber foto: UNICEF)

Setelah disetujui semua pihak, proses penyusunan ulang Renstra AMPL Provinsi Papua segera dimulai. Lokakarya 3 hari diadakan pada bulan April 2012 yang diikuti semua pemangku kepentingan, seperti

instansi-instansi provinsi, perguruan tinggi setempat, lembaga non-pemerintah lokal maupun internasional (CARE, Wahana Visi Indonesia), program-program bidang AMPL (PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri-Respek dan IUWASH). Salah satu hasil lokakarya tersebut adalah terbentuknya Tim Kecil Perumus Renstra AMPL Provinsi Papua. Setelah melalui 11 pertemuan, tim kecil berhasil merumuskan draft Renstra AMPL yang kemudian dibahas dan disepakati dalam Lokakarya Finalisasi Draft Renstra AMPL Provinsi Papua di bulan Nopember 2012.

Tidak ingin mengulangi pengalaman yang sama, pejabat Bappeda Provinsi Papua saat itu, Fredy Molle, meminta Fasilitator Kelembagaan dapat mendampingi untuk memformalkan Renstra AMPL. Selain menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, sebagian isi Renstra AMPL setidaknya dapat dijadikan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah dikaitkan dengan salah satu produk yang dikenal dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, barulah Renstra AMPL dianggap oleh para pengambil keputusan.



Renstra AMPL baru akan diperhatikan jika rencana itu memiliki status hukum yang jelas. Dorong pemerintah setempat untuk memformalkan renstra tersebut agar nantinya semua instansi terkait akan menggunakannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerjanya masing-masing.

Memformalkan Renstra AMPL sebagai bagian dari RPJMD atau RKPD ternyata tidak semudah dan secepat yang dibayangkan. Sesuai saran Fredy Molle, pilihan alternatif praktisnya adalah menjadikan Renstra AMPL sebagai suatu peraturan gubernur. Melalui proses birokrasi persetujuan yang panjang dan berliku, Rensta AMPL tersebut akhirnya berhasil disetujui dan diterbitkan sebagai peraturan gubernur tersebut. Nama resminya, Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pembangunan Layanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Papua Tahun 2013-2017.

Luar biasanya, keberadaan peraturan gubernur tersebut berhasil mendorong masuknya isu pembangunan air minum dan sanitasi ke dalam RPJMD Provinsi Papua. Peraturan gubernur tersebut juga menginspirasi masuknya isu sanitasi ke dalam peraturan-peraturan gubernur lainnya. Misalnya, Peraturan Gubernur Papua terkait Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan yang menyebutkan bahwa sebagian dana otonomi khusus bidang kesehatan harus diperuntukkan untuk mendukung kegiatan STBM di tiap kabupaten/kota. Peraturan gubernur terkait Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Bidang Pendidikan mewajibkan sekolah, mulai dari SD sampai SMA, untuk memiliki jamban dan sarana air bersih.

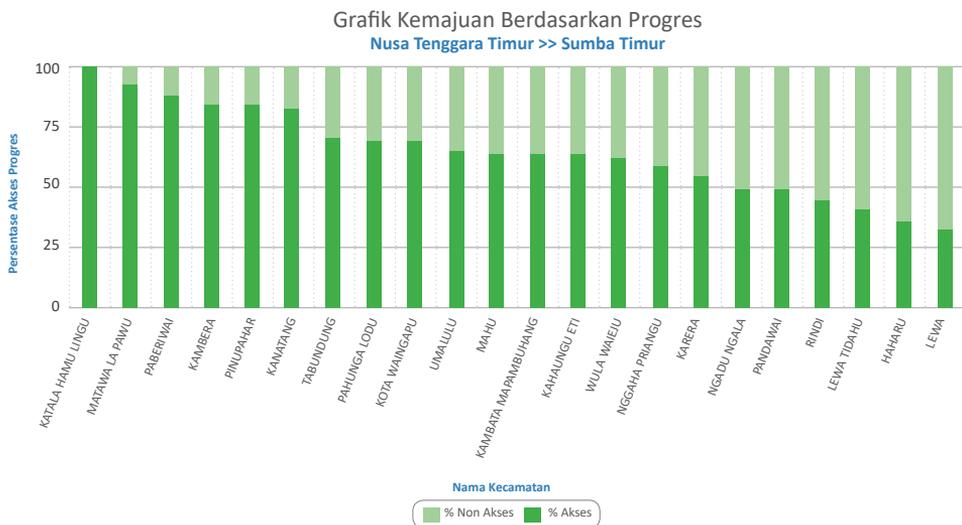
MENDORONG PERENCANAAN DENGAN DATA KINERJA STBM

Data kinerja penerapan STBM untuk tiap kabupaten se-Indonesia dapat dilihat langsung di situs STBM. Asalkan petugas-petugas kesehatan di daerah rajin memasukkan data STBM, kesenjangan tiap kabupaten terhadap target 100-0-100 dapat diketahui. Keberadaan data tersebut digunakan pemerintah kabupaten untuk membuat pihak-pihak berkepentingan mengetahui kinerja daerahnya. Perencanaan pembangunan dapat disusun sesuai dengan kinerja yang dimiliki saat ini.

Sekretariat STBM Nasional sejak tahun 2009 sudah mengembangkan suatu sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk mempermudah penyampaian dan perhitungan data capaian akses sanitasi dasar dan desa ODF (*Open Defecation Free*) secara nasional. Ada 2 (dua) cara yang dapat digunakan oleh para petugas desa dan kelurahan untuk memasukkan data, yaitu melalui

situs STBM dan melalui layanan pesan singkat (*short messaging service* atau SMS). Data dapat langsung ditampilkan di situs STBM sehingga semua pihak dapat mendapatkan informasi kemajuan penerapan STBM yang mutakhir, khususnya menyangkut penerapan Pilar 1, yaitu Stop BABS.

Sistem monev ini telah dimanfaatkan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berkat dorongan Dinas Kesehatan-nya, petugas-petugas Puskesmas di kabupaten tersebut secara berkala menyampaikan data akses jamban ke sistem monev ini. Dengan demikian, kinerja mutakhir penerapan Pilar-1 STBM di kabupaten tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh para pemangku kepentingan. Mereka juga dapat membandingkan data kinerja STBM kabupatennya dengan data kinerja kabupaten-kabupaten lain di Provinsi NTT.



Berdasarkan data pada situs STBM sampai dengan Desember 2016, capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 64%, dengan rincian 22% menggunakan jamban sehat permanen, 31% menggunakan jamban sehat semi permanen, dan proporsi jumlah KK yang menggunakan jamban secara bersama yaitu sekitar 11%.

Data kinerja penerapan STBM Kabupaten Sumba Timur itu juga digunakan sebagai bahan advokasi penerapan STBM ke para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di kabupaten tersebut pada bulan Februari 2017. Musrenbang tersebut adalah forum resmi musyawarah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di suatu tahun anggaran. Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Sumba Timur, anggota-anggota DPRD, semua pemangku kepentingan di tingkat kecamatan Kanatang termasuk Kepala Desa/Lurah dan *stakeholders* di tingkat desa/kelurahan dan juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur. Turut hadir juga adalah Fasilitator Kelembagaan WASH di kabupaten tersebut, Sarviam Elvita Berry.



Pemaparan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Sumba Timur oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kanatang, turut hadir Bupati Sumba Timur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. (Sumber foto: UNICEF)

Pemaparan data situs STBM tersebut berhasil membuat berbagai pihak berkepentingan memahami *gap* yang ada untuk mencapai target 100-0-100. Komitmen dan kerja keras bersama dari para pihak mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM lokal, pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan hingga kabupaten masih dibutuhkan. Di sisi lain, pihak-pihak berkepentingan mengetahui bahwa 2 dari 5 desa di Kecamatan Kanatang, yaitu Desa Ndayayami dan Desa Kuta, telah tercatat secara nasional dalam data *website* STBM sebagai desa yang telah bebas *tai wewar* (*Buang Air Besar Sembarangan/BABS. red*). Desa-desa lainnya, yaitu Desa Hamba Praing, Desa Mondu dan Kelurahan Temu masing-masing sudah mencapai 86%, 48%, dan 77%.

“*Paparkan data yang ada untuk mengadvokasi tiap pemangku kepentingan tentang adanya kebutuhan pembangunan sanitasi. Data sanitasi yang dibutuhkan sebenarnya sudah tersedia dan mudah diakses sehingga dapat langsung digunakan.*”

Apresiasi terhadap pencapaian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sumba Timur, Frida M. Yiwa. Musrenbang menyepakati adanya anggaran untuk desa-desa yang telah bebas dari BABS untuk meningkatkan status jambannya. Misalnya, keluarga yang hanya memiliki jamban sehat semi permanen perlu ditingkatkan statusnya menjadi jamban sehat permanen. Anggaran tersebut dapat melalui Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



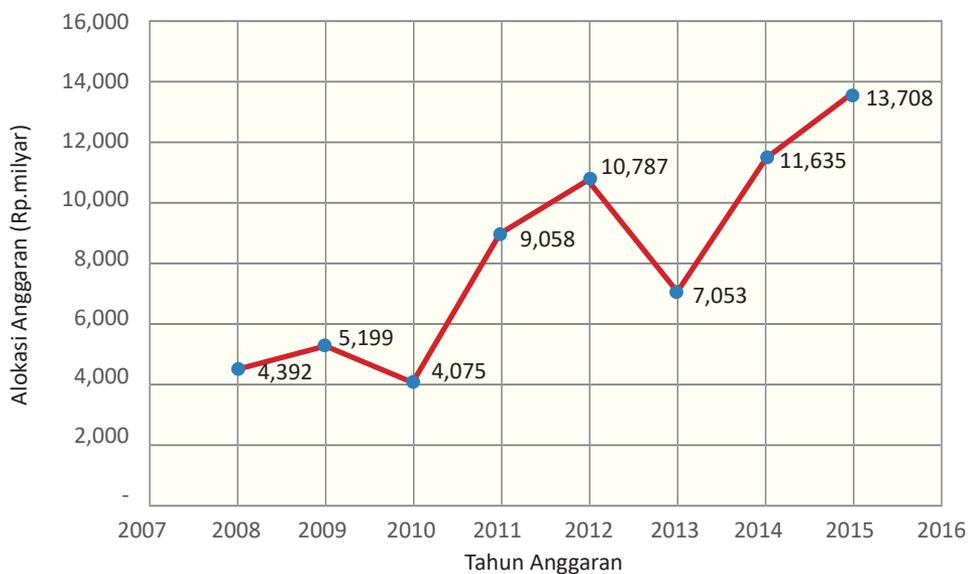
KOORDINASI

KOMUNIKASI, SINKRONISASI, LALU SINERGI

Kerjasama instansi-instansi pemerintah adalah syarat berhasilnya upaya peningkatan perilaku sanitasi masyarakat di suatu wilayah. Sayangnya, membuat mereka bekerjasama tidaklah mudah. Tiap instansi sudah disibukkan dengan tugas pokoknya masing-masing. Kerjasama antar instansi sebenarnya dapat ditingkatkan asalkan ada komunikasi yang lebih baik di antara mereka. Pertemuan-pertemuan harus diadakan agar mereka dapat saling berbagi informasi dan bertukar pikiran. Dari situ mereka akan mencoba melakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatannya sebelum akhirnya melihat peluang kerjasama.

Faktor kerjasama antar-instansi seringkali membuat manfaat pembangunan sanitasi tidak sebesar yang diharapkan. Contoh, sarana MCK ++ dan sarana hidran umum di Kabupaten Luwu Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) yang sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan masyarakat. Masalah ini terjadi karena tidak ada koordinasi antara instansi, pemerintah desa dan para sanitarian. Bantuan pembangunan

fisik yang diberikan instansi pekerjaan umum tidak dibarengi dengan upaya perubahan perilaku masyarakat oleh para sanitarian. Demikian juga sebaliknya, upaya perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan para sanitarian tidak diikuti dengan bantuan pembangunan fisik. Semua instansi bekerja menggunakan anggarannya masing-masing tanpa komunikasi dan koordinasi yang kuat. Akibatnya, walau alokasi anggaran pembangunan sanitasi kabupaten itu terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat gambar berikut), hasilnya tidak sebesar yang diharapkan.



Alokasi anggaran pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Luwu Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, alokasi anggarannya mencapai Rp 13,7 milyar yang merupakan peningkatan signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 11,6 milyar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Luwu Utara, Samri To Ngili memulai gerilyanya. Tiap instansi terkait didatanginya, demikian juga program-program pembangunan yang relevan dengan sektor air minum dan penyehatan lingkungan. Dia menyebutnya sebagai gerilya KiSS (Koordinasi, Sinkronisasi dan

Sinergi), meminjam istilah yang sering digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Bersama koordinator program PAMSIMAS, Samri memulai pertemuan sinkronisasi-sinergi yang terfokus pada pembangunan air minum dan sanitasi. Sasaran spesifiknya adalah para pelaku program pembangunan infrastruktur, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMPd), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dan kegiatan Stimulan Jamban Keluarga (Jaga).

Pertemuan sinkronisasi-sinergi antar pemangku kepentingan dilakukan pertama di bulan Mei 2015 dan kedua di bulan September 2016. Semuanya dibiayai anggaran pemerintah kabupaten. Hasil pertemuan merekomendasikan beberapa sinkronisasi dari program-program STBM BMGF Wash Unicef, PAMSIMAS, Stimulan Jaga, SLBM, PNPM dan PPIP. Demikian juga, sinkronisasi kegiatan-kegiatan instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, khususnya untuk mensosialisasikan pembangunan bidang air dan sanitasi di kegiatan-kegiatan rutinnnya. Beberapa sarana terbangun yang tidak berfungsi direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh Instansi terkait.

Pertemuan sinkronisasi-sinergi juga menyepakati jalan tengah untuk mengatasi perbedaan prinsip antara program Stimulan Jaga dengan pendekatan STBM. Dana stimulan nantinya hanya akan diberikan ke masyarakat yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat bersedia untuk merubah perilaku BABS-nya, namun terverifikasi tidak mampu secara ekonomi.

Rekomendasi ditindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan aspek teknis dari implementasi sinkronisasi yang direkomendasikan.

Hasilnya, semua Puskesmas mengalokasikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemicuan masyarakat. Beberapa pihak diminta untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti fasilitator STBM program PAMSIMAS dan fasilitator dari program-program lainnya.

Selain berhasil mulai mensinkronkan kegiatan-kegiatannya, hasil penting lainnya adalah semakin banyaknya pejabat setempat yang berbicara mengenai isu-isu kesehatan masyarakat. Mereka juga menyadari bahwa pembangunan kesehatan masyarakat merupakan urusan semua instansi. Sebagai contoh, Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Luwu Utara yang jumlahnya mencapai 359 pos akan ditingkatkan fungsinya sebagai Pusat Koordinasi (Posko) program Kesehatan Masyarakat. Tugas bidan tidak hanya mengurus kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, tetapi juga mengurus semua urusan kesehatan dan keselamatan semua masyarakat desa tempatnya bertugas.

Komunikasi dan sinkronisasi antar instansi juga berhasil ditunjukkan dengan baik di Kelurahan Seppe (Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan). Guna mengatasi keterbatasan alokasi anggaran kelurahan setempat, mau tidak mau semua pihak yang ada di wilayahnya harus dilibatkan secara aktif dan berkontribusi. Dengan bantuan Fasilitator Kelembagaan program WASH di kabupaten itu, Darwis, kantor kelurahan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melakukan sinkronisasi kegiatan dengan Puskesmas Kecamatan Barru, kantor Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) setempat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru.



Program Gerakan Masyarakat Membangun Satu Juta Jamban untuk Keluarga di seluruh Indonesia (Gema Sang Juara) diluncurkan TNI Angkatan Darat di tahun 2015. Program ini ditujukan untuk membantu pembangunan jamban di hunian-hunian warga tidak mampu. Program pembuatan jamban gratis oleh TNI AD ini dinilai sangat baik karena menunjukkan kepedulian TNI AD terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. (Sumber foto: UNICEF)

Puskesmas bekerjasama dengan menugaskan sanitarian-nya untuk melakukan pemecuan di tempat-tempat yang disasar oleh kegiatan pengadaan jamban keluarga. Sebelumnya, mereka juga memberikan data BABS yang banyak membantu penentuan sasaran kegiatan tersebut. Kerjasama dengan kantor Komando Rayon Militer 1405-06 (Kecamatan Barru) berhasil diperoleh sehingga kegiatan “Satu Juta Jamban” yang diprakarsai TNI-AD dapat dilakukan di daerah itu. Anggota KORAMIL dikerahkan untuk membantu masyarakat membangun jamban. Pada tahun 2014, kerjasama dengan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Barru berhasil diperoleh untuk pelaksanaan PAMSIMAS. Fasilitas air bersih PAMSIMAS saat ini telah terbangun di lingkungan Jeppee. Masyarakat tidak lagi menghadapi masalah ketersediaan air untuk jamban-jamban mereka.

“ *Ciptakan kondisi yang mampu mendorong timbulnya komunikasi dan pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan sanitasi. Hal tersebut merupakan prasyarat terbentuknya sinergi di antara mereka.*

Keberhasilan yang dicapai kedua wilayah ini menunjukkan bahwa sinkronisasi dan kolaborasi adalah kunci sukses pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi. Syaratnya, para fasilitator perlu memastikan adanya komunikasi yang baik antar pihak-pihak terkait. Sejalan dengan hal ini, Fasilitator Kelembagaan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Bunga Tongeng, menyatakan bahwa pemetaan pelaku dan kelembagaan merupakan langkah awal untuk dapat bergerak bersama. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat dapat menyatukan potensi yang ada dan mengungkit dampaknya.

SUDAH SELAYAKNYA, SANITARIAN DILIBATKAN

Mitra terbaik dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat ke masyarakat adalah para sanitarian. Mereka ada di tiap Puskesmas. Mereka dididik dan dilatih untuk mendorong masyarakat agar hidup lebih sehat, serupa dengan tugas tujuan program-program sanitasi. Banyak sanitarian sudah belasan tahun menjalankan tugasnya. Mereka mengenal wilayah kerjanya dengan baik. Dedikasinya terhadap kesehatan masyarakat luar biasa. Kerjasama yang baik antara Fasilitator Kelembagaan dengan para sanitarian merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan promosi perilaku sanitasi di suatu wilayah.

Kepiawain para sanitarian dalam menyadarkan masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih bersih dan sehat rasanya tidak perlu diragukan lagi. Selain sebagai motivator handal, sanitarian juga merupakan gudang ilmu dan pengetahuan tentang berbagai hal. Baik tentang prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat, maupun juga tentang karakteristik masyarakat di wilayah kerjanya.



Fritje Linggar sudah melakukan pemicuan sejak tahun 2008, saat programnya masih dikenal sebagai pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation). Pengalamannya sebagai sanitarian membuat dia mudah menjalankan perangnya dalam program STBM. Dedikasinya sangat tinggi sehingga dia rela menggunakan kendaraan pribadinya untuk menempuh perjalanan antar kampung yang jauh dan sulit. Salah satu keberhasilannya adalah terintegrasinya program PNPM Respek dengan pemicuan yang dia lakukan di beberapa kampung di distrik Tanah Rubuh. (Sumber foto; UNICEF)

Sebagai contoh, ada Fritje Linggar dan Dolfinus Yauply di Kabupaten Manokwari (Provinsi Papua Barat). Seperti sanitarian lainnya, kedua sanitarian ini mengenal baik karakter wilayahnya dan memahami berbagai hambatan dan tantangan di wilayahnya masing-masing. Mereka tahu kampung dan kelompok masyarakat mana yang membutuhkan pendekatan khusus. Mereka dapat memberi usulan solusi berdasarkan pengalaman mereka untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Keterlibatan kedua sanitarian ini menjadi pendorong pencapaian STBM di wilayahnya masing-masing. Mereka juga sangat terbuka untuk bersinergi dengan Fasilitator Kelembagaan program WASH yang ditugaskan di Provinsi Papua Barat, Febriansyah.



Dolfinus Yauply (kaos garis putih) tidak pernah lelah melakukan pemicuan di kampung-kampung distrik Masni dan mendampingi masyarakatnya sampai meraih status SBS di tahun 2012. Salah satu keunggulan pendekatan STBM yang dia yakini adalah adanya upaya menyadarkan masyarakat secara nyata. Misalnya, masyarakat langsung melakukan transek lapangan dan meninjau tempat buang air besarnya. Masyarakat melihat langsung sumber air yang mungkin tercemar oleh kotoran mereka sendiri. (Sumber foto: UNICEF)

Sanitarian memiliki jaringan kerja yang luas dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Di Distrik Tanah Rubuh, Frietje berhasil mengintegrasikan program STBM dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Akibatnya, setelah mengikuti pemicuan, masyarakat dapat mengajukan bantuan pembangunan jamban. Sedangkan Dolfinus di Distrik Masni memanfaatkan jaringan peribadatannya untuk mendukung promosi perilaku sanitasi. Sebagai tokoh gereja setempat, Dolfinus dapat melakukan penyuluhan tentang pentingnya sanitasi yang baik di sela-sela peribadatan. Dia juga kerap menyisipkan ayat-ayat dari Alkitab saat melakukan pemicuan dan berdiskusi dengan masyarakat.



Tenaga sanitarian melakukan pemucuan di sebuah desa di Provinsi Papua. (Sumber foto: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari bersama Tim Pamsimas)

Tidak banyak tenaga ahli di Papua Barat yang memahami pentingnya kesehatan lingkungan sekaligus bersungguh-sungguh mengajak masyarakat untuk berubah. Frietje dan Dolfinus merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat Papua Barat, khususnya bagi Kabupaten Manokwari. Keduanya yang saat ini sudah menjadi staf dinas kesehatan kabupaten Manokwari telah bergelut dengan penyuluhan dan pemucuan STBM sejak tahun 2008 dan dengan ikhlas mengabdikan diri agar kesehatan masyarakat asli Papua menjadi lebih baik.



Jadikan sanitarian sebagai mitra kerja, guru, motivator dan sumber informasi bagi para fasilitator. Mereka merupakan sumber daya yang luar biasa untuk membantu kelangsungan promosi perilaku sanitasi di wilayahnya masing-masing.

Sanitarian merupakan pembina terbaik bagi para fasilitator baru. Demikianlah yang dialami oleh fasilitator Jhon Wetipo saat mulai bertugas di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) di tahun 2014. Pemicuan harus dilakukan di tujuh kampung yang wilayahnya terletak di pinggiran danau. Tantangannya beragam, mulai dari jaraknya yang jauh, alamnya yang berat dan karakter masyarakatnya yang keras. Sangat berbeda dengan bayangannya sebelumnya. Berkat bantuan tiga orang sanitarian Puskesmas setempat, pemicuan berhasil dilakukan. Selain membantu proses pemicuan, ketiga orang sanitarian tersebut terus memberi motivasi dan saran ke fasilitator. Berkat kehadiran para sanitarian, fasilitator lebih mudah diterima masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi lebih lancar.



Pertemuan sanitarian di Kabupaten Jayapura mempercepat pertukaran informasi dan juga ajang saling memotivasi. (Sumber foto: UNICEF)

Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa sanitarian memang layak dilibatkan dalam program promosi perilaku bersih dan sehat. Para sanitarian dapat menjadi mitra kerja, guru, motivator dan sumber informasi bagi para fasilitator. Inovasi-inovasi yang mereka lakukan terbukti efektif dalam merubah kebiasaan warga. Kerja keras mereka pun mampu menggugah hati para pemimpin di wilayahnya untuk peduli akan sanitasi demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

MEMANFAATKAN MOMENTUM KEBIJAKAN BARU

Tidak semua daerah mau membuat kebijakan atau peraturan baru terkait arah pembangunannya. Ada konsekuensi di balik itu, khususnya menyangkut alokasi sumber daya. Makin sulit lagi jika kebijakan itu terkait urusan yang selama ini kurang diperhatikan, seperti urusan pembangunan sanitasi. Diberlakukannya kebijakan baru di tingkat nasional dapat memberikan momentum bagi pemerintah kabupaten dan di bawahnya untuk menyusun kebijakan dan peraturan baru. Fasilitator Kelembagaan harus jeli memanfaatkan hal-hal yang dapat dijadikan momentum perubahan di wilayah kerjanya.

Demikianlah yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dimanfaatkan oleh para pelaku air minum dan sanitasi di sana untuk mendorong pemerintah desa agar mau lebih memperhatikan

pembangunan sektor air minum dan sanitasi di wilayahnya masing-masing. Langkah pertama yang segera dirasakan perlu adalah menerbitkan peraturan bupati turunan dari UU tersebut. Peraturan bupati tersebut diharapkan akan mewajibkan pemerintah desa untuk memanfaatkan alokasi anggaran pembangunan desa untuk sektor air minum dan sanitasi.

Upaya advokasi ke pemerintah kabupaten pun dilakukan oleh Samri To Ngili, Fasilitator Kelembagaan program WASH yang bertugas di daerah itu. Tujuannya, agar pemerintah kabupaten mau memulai penyusunan rancangan peraturan bupati. Berbagai pihak diundang untuk menyusun draft peraturan tersebut. Penyusunannya relatif singkat. Hanya butuh 2 minggu dengan 4 kali pertemuan formal sebelum draft peraturan itu dibahas dalam kegiatan uji publik maupun uji kelayakan. Wakil-wakil pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, dilibatkan dalam kedua uji tersebut.

Sesuai masukan-masukan yang diterima, beberapa pasal direvisi khususnya menyangkut pasal tentang upaya penyehatan lingkungan dan pendidikan PHBS di sekolah. Rancangan hasil uji kelayakan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk disempurnakan redaksinya, sebelum akhirnya disahkan oleh bupati dengan nama resmi Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Kelurahan Sehat. Peraturan bupati ini dinilai sangat tegas karena mencantumkan sanksi bagi pimpinan instansi, camat dan kepala desa yang tidak melaksanakan program desa sehat di wilayah kerjanya, termasuk untuk alokasi 10 % anggaran desa dan melaksanakan promosi 5 pilar STBM.

Sosialisasi peraturan bupati ke pemerintah-pemerintah desa dilakukan serentak oleh berbagai pihak. Termasuk oleh individu-individu dari

Pokja AMPL kabupaten, kantor kecamatan, Puskesmas, kegiatan Desa Siaga Aktif, selain juga oleh para fasilitator sanitasi. Hasilnya luar biasa. Seluruh kepala desa sepakat untuk menerbitkan peraturan desa tentang STBM dan menyatakan komitmennya untuk mencapai SBS di akhir 2018. Mereka menyepakati adanya alokasi 10% anggaran pemberdayaan desa untuk sektor air minum dan sanitasi. Bahkan, ada desa yang menyatakan komitmennya untuk menargetkan 100% cakupan dan layanan air minum dan jamban sebelum tahun 2017.



Pokja AMPL melakukan beberapa pertemuan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi pemerintah desa untuk memasukkan sektor pembangunan air minum dan sanitasi desa dalam dokumen perencanaan pembangunan desanya masing-masing. Baik pada momen asistensi penyusunan anggaran pembangunan desa maupun pada kegiatan Musrenbang desa serta kegiatan-kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) oleh Puskesmas dan Kader Desa Siaga Aktif. (Sumber foto: UNICEF)



Tidak selalu mudah untuk membuat pemerintah daerah mau mengubah atau menyusun suatu peraturan. Manfaatkan perubahan kebijakan di tingkat nasional sebagai pendorong untuk menciptakan perubahan kebijakan di wilayah kerja masing-masing.

Tanpa adanya momentum pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, belum tentu pihak-pihak berkepentingan di Kabupaten Luwu Utara mau mengeluarkan peraturan baru di desanya masing-masing. Belum tentu ada alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk sektor air minum dan sanitasi. Peraturan bupati tersebut mendorong peningkatan alokasi anggaran pembangunan air minum di desa-desa sampai lebih dari Rp 925 juta. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran anggota Pokja AMPL dan Camat dalam mengawal dan mendampingi desa-desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya dan anggaran desa.

Momentum perubahan dapat muncul kapanpun. Terkadang faktor eksternal, tetapi seringkali juga faktor internal. Seorang fasilitator harus jeli mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dalam contoh di atas, Samri To Ngili sebagai Fasilitator Kelembagaan berhasil memanfaatkan momentum eksternal untuk menggerakkan dan mendampingi para pemangku kepentingan di wilayah kerjanya sampai berhasil menerbitkan peraturan baru.

MENGAITKAN KE URUSAN DAN KEBIJAKAN LAIN

Butuh berbagai inovasi dalam mewujudkan 100% akses air minum dan sanitasi. Hal ini disadari betul oleh para pelaku air dan sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka jeli untuk mengaitkan isu air dan sanitasi dengan isu perubahan iklim. Hasilnya, agenda pembangunan air dan sanitasi berhasil masuk ke dalam Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTT. Urusan air dan sanitasi jadi memperoleh prioritas lebih tinggi lagi di provinsi tersebut. Wawasan luas dari seorang fasilitator sangat dibutuhkan untuk mendorong penggabungan isu air dan sanitasi ke dalam kebijakan bidang lain.

Dampak perubahan iklim juga mempengaruhi angka kesehatan masyarakat. Pernyataan itu diperkuat oleh hasil kajian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) yang menyimpulkan

adanya perubahan pola penyebaran penyakit berbasis lingkungan akibat berubahnya suhu dan curah hujan. IPCC bahkan juga menyebutkan telah terjadinya peningkatan angka kematian yang penyebabnya berhubungan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengakibatkan bertambah parahnya kekeringan, berkurangnya cadangan air tanah serta naiknya muka air laut. Khawatir akan potensi dampak perubahan iklim tersebut, pemerintah Indonesia mendorong disusunnya strategi adaptasi perubahan iklim terutama pada daerah-daerah yang dianggap rentan. Salah satu daerah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).



Pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dalam urusan air dan sanitasi. Saat ini Pemerintah Provinsi NTT sudah memasukkan target universal access ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 dan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. (Sumber foto: UNICEF)

Fasilitator Kelembagaan program WASH yang bertugas di Provinsi NTT, Wisnu Wardhana memanfaatkan keterkaitan kedua isu tersebut. Dia mendampingi Pokja AMPL Provinsi NTT untuk memasukkan isu air dan sanitasi ke dalam Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTT. Tujuannya, agar agenda adaptasi perubahan iklim nantinya turut mendukung terwujudnya kemanfaatan akses air dan sanitasi yang berguna dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya mengejar target *universal access* di tahun 2019 akan mendapat amunisi baru.

“ *Sumber daya untuk membantu peningkatan layanan air minum dan sanitasi mungkin saja tersebar di berbagai tempat. Jelilah melihat rencana-rencana pembangunan sektor lain yang mungkin berhubungan dengan sektor air dan sanitasi, termasuk juga sektor-sektor yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan.* ”

Untuk memastikan tercapainya tujuan itu, pemerintah provinsi membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Provinsi NTT yang anggotanya antara lain terdiri dari wakil-wakil instansi provinsi, seperti Bappeda, Dinas Petambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan lainnya. Beberapa pertemuan dihadiri untuk meyakinkan pentingnya isu air dan sanitasi masuk ke dalam rencana aksi daerah tersebut. Hasilnya, isu pengelolaan limbah masuk ke dalam rencana aksi yang diformalkan dalam Peraturan Gubernur NTT No. 40 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Provinsi NTT.

Dimanapun, seorang fasilitator harus jeli untuk mendapatkan isu, program atau proyek yang dapat disinergiskan dengan urusan air dan sanitasi. Pemerintah Provinsi NTT melalui Pokja AMPL berupaya mensinergikan seluruh program Pembangunan AMPL di provinsi NTT. Elaborasi isu air dan sanitasi AMPL dalam penyusunan RAD API merupakan salah satu contohnya. Selain agar nantinya berpengaruh pada meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat di provinsi tersebut, kolaborasi dengan isu perubahan iklim juga bertujuan agar masyarakat semakin peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga dampak-dampak negatif dari perubahan iklim dapat dicegah.



PEMANTAUAN

LEBIH EFEKTIF LIBATKAN WARGA DALAM MONEV

Ada banyak strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari kelangsungan dan kinerja suatu kegiatan. Salah satunya dengan melibatkan langsung wakil-wakil warga desa yang menjadi sasaran monev. Mereka diajak untuk mendiskusikan dan mengevaluasi hasil monitoring pencapaian kegiatan promosi sanitasi di desanya. Selain untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penerapan strategi monitoring dan evaluasi partisipatif ini juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat.

Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sangat aktif dalam menjalankan program STBM. Targetnya, 100 % warga kabupaten itu akan memiliki akses ke jamban sehat di tahun 2019. Untuk mengetahui pencapaiannya dari waktu ke waktu, pemerintah kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala. Kegiatan monev juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendala-kendala pelaksanaan program promosi sanitasi dan memperoleh

masuk untuk menentukan solusinya. Sebagaimana disampaikan pejabat setempat, hasil monev nantinya membuat pemerintah lebih memahami jenis promosi sanitasi yang dibutuhkan masyarakatnya. Bisa saja satu desa akan lebih membutuhkan jenis promosi yang lain karena desa tersebut sudah hampir mencapai status bebas dari BABS.

Dengan didukung program WASH, pemerintah kabupaten berupaya untuk menerapkan pendekatan monev partisipatif. Berbagai pihak mulai dari kepala dan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, sanitarian, sampai beberapa warga desa dilibatkan secara aktif sebagai anggota tim monev. Dalam monev partisipatif yang dijadwalkan tiga bulan sekali ini, Tim Monev pergi mengunjungi desa sasaran dan menilai melihat tingkat penggunaan jamban dan perilaku pilar STBM lain di tiap rumah warga. Sebelumnya, Tim Monev melakukan *focus group discussion* dengan wakil pemerintah desa, kader desa dan wakil masyarakat untuk mengenali isu-isu utama sanitasi dan pelaksanaan STBM di desa tersebut.

Dalam kunjungan ke tiap rumah warga, anggota Tim Monev akan berdiskusi untuk mengenali permasalahan dan hambatan spesifik yang dihadapi warga. Masyarakat juga diajak mendiskusikan rencana yang dapat dilakukan untuk menghentikan kebiasaan BABS. Setelah dibahas secara internal oleh seluruh anggota tim, hasil monitoring akan disampaikan kepada kepala desa untuk dievaluasi bersama warganya. Disinilah kelebihan monev partisipatif. Evaluasi dilakukan bersama obyek monev sehingga mereka dapat langsung memberi klarifikasi dan komentar terhadap hasil monitoring. Acara ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu sanitasi. Usulan penyelesaian masalah dapat dibahas dengan calon-calon pelakunya nanti agar lebih sesuai dengan tantangan dan kemampuan yang ada.



Berbeda dengan pendekatan monev konvensional, pendekatan Monitoring Partisipatif memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai objek monev tetapi juga sebagai pelaku. Hasil-hasil monitoring konvensional dipaparkan ke masyarakat guna memverifikasi data sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. (Sumber foto: UNICEF)

Salah satu kunci keberhasilan monev partisipatif adalah adanya pembekalan ke para pelaku monitoringnya, termasuk tentunya masyarakat. Mereka harus memahami betul prinsip dan prosedur monev partisipatif. Untuk itu, Fasilitator Kelembagaan program WASH yang bertugas di Kabupaten Luwu Utara, Samri To Ngili membantu pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mengadakan TOT (*Training of Trainers*) Monitoring Partisipatif selama dua hari di bulan Agustus 2016. Pelatihan ini diikuti yang diikuti oleh staff kecamatan, sanitarian Puskesmas, fasilitator, dan perwakilan dari komunitas masyarakat. Peserta TOT ini diharapkan nantinya akan melatih pihak-pihak lain dan masyarakat untuk melakukan monev.



Libatkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kondisi sanitasi di wilayahnya. Selain untuk mengkonfirmasi hasil pemantauan, keterlibatan mereka juga sekaligus dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap permasalahan sanitasi di wilayahnya.

Pelatihan diharapkan dapat juga meningkatkan peran dari instansi-instansi darimana peserta berasal. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Kelurahan (BPMDK) dapat mendorong masuknya isu air dan sanitasi di agenda perencanaan pembangunan dan regulasi desa. BPMPDK juga diharapkan dapat mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi ke para camat dan kepala desa. Camat dan staf di kantor kecamatannya diharapkan akan lebih siap mengambil peran aktif untuk mendorong akselerasi STBM di wilayah kerjanya. Puskesmas serta LSM diharapkan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, untuk menyampaikan pengetahuannya ke masyarakat desa.

MENYIAPKAN DATA BASELINE UNTUK DIPAKAI BERSAMA

Masalahnya dimana-mana sama, sulitnya memperoleh data yang meyakinkan. Demikian juga yang dialami para pelaksana program pembangunan air minum dan sanitasi. Tiap instansi pemerintah memiliki data yang berbeda untuk akses air minum atau jamban sehat. Tidak heran jika akhirnya tiap-tiap program pembangunan terpaksa mengumpulkan data sendiri di lapangan. Inefisiensi ini dicoba dihindari dengan sistem data yang dibuat bersama oleh pihak-pihak berkepentingan. Kebutuhan spesifik tiap pihak diakomodasi dalam sistem data tersebut, khususnya dalam menyiapkan data *baseline*.

Perbaikan sistem data pernah dilakukan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2012. Menyadari pentingnya keberadaan data untuk mengevaluasi kinerja pembangunan, Pokja AMPL Kabupaten Takalar menginisiasi penyempurnaan sistem

data AMPL dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Mulai dari staf pemerintah, sanitarian hingga camat dan kepala desa dilibatkan, demikian juga para pengelola dan fasilitator program-program air dan sanitasi di daerah itu. Fokus awalnya adalah pengembangan data *baseline* akses air minum dan sanitasi yang dapat digunakan bersama. Dengan data baseline itu, perkembangan pembangunan air dan sanitasi yang terjadi di kabupaten itu dapat tercatat lebih baik.

Para anggota tim bekerja keras untuk menyepakati jenis dan format data yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait. Lengkap tetapi harus tetap sederhana guna mempermudah pengumpulan datanya kelak. Selain data keluarga dan rumah, jenis data yang perlu diperoleh juga mencakup data sarana air bersih, sarana jamban, sarana pengelolaan air limbah dan cara pengelolaan sampah. Sistem data dibuat dengan pola penomoran data yang sesuai dengan urutan letak rumah guna mempermudah pemutahiran datanya kelak.

“ *Data baseline kondisi wilayah harus dapat digunakan bersama oleh berbagai program pembangunan. Hal ini akan mencegah terjadinya perbedaan interpretasi terhadap capaian target pembangunan. Libatkan pihak-pihak berkepentingan saat menyusun rencana pengembangan data baseline tersebut.* ”

Pengumpulan data di 9 kecamatan dilakukan oleh kader-kader dusun yang sudah dilatih menggunakan pola data baru. Fasilitator Kelembagaan Program WASH di Kabupaten Takalar, Evelyn ikut aktif memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengumpulan data. Verifikasi data

yang diperoleh dari total 308 dusun dan 144 lingkungan itu dilakukan secara bertahap. Setelah diverifikasi oleh para sanitarian, data juga diverifikasi oleh para camat dan kepala desa. Keterlibatan para perangkat kecamatan dan desa dalam proses verifikasi itu juga akan membuat mereka memahami kondisi akses air minum dan sanitasi di wilayah masing-masing.



Pengumpulan data akan dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dengan melibatkan Pokja AMPL. Penyempurnaan sistem data dan pembaharuan data akan terus dilakukan sesuai saran dari penggunaannya. Untuk kepentingan-kepentingan itu, pemerintah kabupaten sudah akan mengalokasikan anggarannya. (Sumber foto: UNICEF dan LEMINA)

Data *baseline* ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan oleh instansi-instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perusahaan Daerah Air Minum. Demikian juga diharapkan tiap desa dapat menggunakan data ini sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMDes.

PAKAI TEKNOLOGI MAJU UNTUK KELOLA DATA

Pengumpulan data dalam monitoring program seringkali menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Apalagi untuk wilayah kerja yang luas. Dalam kondisi demikianlah, teknologi komunikasi dan informasi akan sangat bermanfaat. Baik mengandalkan layanan internet maupun SMS, data dapat segera terkirim ke pusat pengelolaan data. Akurasi penyimpanan data dapat lebih terjamin karena tidak ada lagi penyalinan data secara manual. Bahkan, data dapat langsung terproses begitu data sampai ke pusat pengelolaan data.

Contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT atau *information and communication technology*) dijumpai Wisnu Wardhana, Fasilitator Kelembagaan program WASH untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai daerah kepulauan, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program di provinsi

itu membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal. Jarak dari satu tempat ke tempat lainnya sangat jauh. Untuk mengatasi tantangan ini, Pokja AMPL Provinsi NTT melakukan terobosan dengan memanfaatkan aplikasi KoBo Collect yang dapat di-*install* di *smartphone* para pengumpul data.

Setelah format kuesioner digital dan strategi survey disepakati, aplikasi ini diujicobakan di 9 kabupaten NTT, yakni Alor, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Kupang, Manggarai Barat, Flores Timur, Timor Tengah Utara dan Ronte Ndao. Biaya pelaksanaan ujicoba, termasuk pelatihan enumerator diambil sepenuhnya dari anggaran pemerintah. Hasilnya memuaskan dan manfaat penggunaan aplikasi ini benar dapat dirasakan. Salah satunya adalah terekamnya data koordinat GPS lokasi survey, foto dan audio-video pelaksanaan survey. Hal ini sangat berguna untuk memverifikasi lokasi dan waktu survey. KoBoCollect juga menyediakan fitur hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik. Melihat kelebihan KoBo Collect, Provinsi NTT berencana untuk mereplikasi penggunaan aplikasi ini di sektor lainnya.

“ *Manfaatkan teknologi komunikasi modern untuk mempermudah kelangsungan kegiatan monev hasil pembangunan layanan air minum dan sanitasi. Dengan biaya yang murah, kecepatan dan akurasi pengelolaan data akan lebih terjamin.* ”

Aplikasi berbasis internet seperti KoBo Collect bukan satu-satunya pilihan teknologi survey. Di Kabupaten Sumba Timur, Pokja AMPL memilih menggunakan teknologi *Short Messaging Service* (SMS) untuk mengirimkan datanya. Data dari sanitarian di 22 kecamatan diterima

pusat data untuk kemudian diproses dan ditampilkan dalam *website*, termasuk dalam bentuk diagram. Sebagaimana dilaporkan Ita, Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Sumba Timur, penggunaan SMS berhasil mendorong para sanitarian untuk semakin aktif meng-input data. Hasilnya, data AMPL Kabupaten Sumba Timur selalu mutakhir/*updated*.

Semua kemajuan teknologi yang ada telah terbukti memudahkan daerah dalam melakukan kegiatan monev. Hal ini tentu membawa keuntungan bagi pembangunan AMPL ke depan. Sudah sewajarnya bila seluruh daerah tidak ragu lagi menerapkan kedua aplikasi berbasis teknologi tersebut. Tidak hanya untuk urusan AMPL tetapi juga untuk sektor pembangunan lainnya.



PEMBIAYAAN

EVALUASI BELANJA DENGAN PERANGKAT YANG TEPAT

Kenaikan anggaran pembangunan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan selama realisasi pembelanjanya tidak tepat. Untuk membantu pemerintah daerah menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya, beberapa waktu lalu diperkenalkan perangkat kajian *Public Expenditure Analysis* (PEA). Perangkat tersebut membantu pemerintah daerah untuk mengenali karakteristik penggunaan anggaran pembangunannya. Termasuk juga menilai efektivitas pembelanjaan anggaran pembangunannya terhadap kenaikan akses air minum dan akses sanitasi.

Saat ini banyak tersedia perangkat-perangkat manajerial untuk membantu penilaian tingkat efisiensi dan efektivitas pembelanjanya. Salah satunya adalah perangkat *Public Expenditure Analysis* (PEA) yang diperkenalkan program WASH di Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tahun 2011. Perangkat sederhana

ini kemudian disepakati oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL Kabupaten Alor untuk dipergunakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan sektor AMPL.

PEA dapat mengevaluasi realisasi pembiayaan AMPL dengan tinjauan-tinjauan khusus berdasarkan sumber anggaran (pusat, provinsi atau kabupaten), pengelola anggaran, penyelenggara layanan yang dibiayai (pemerintah, masyarakat atau swasta), sifat kegiatan yang dibiayai (langsung atau tidak langsung), jenis kegiatan yang dibiayai (investasi, operasi atau pemeliharaan), urusan yang dibiayai (air minum, sanitasi atau pengembangan kapasitas), jenjang kegiatan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat) dan penerima manfaat (rumah tangga, sarana umum, atau instansi pemerintah).

“ *Gunakan perangkat evaluasi belanja pembangunan untuk menilai pengaruh realisasi penggunaan anggaran dengan capaian pembangunannya. Perangkat seperti PEA dan sejenisnya juga dapat membantu terciptanya transparansi dan koordinasi penggunaan anggaran.*

Perangkat PEA juga dapat mengukur realisasi pembiayaan dari sisi kecukupan, prioritas, kecenderungan, keadilan, efisiensi, manajemen, partisipasi sosial, akuntabilitas dan keberlanjutan. Perangkat ini secara khusus juga dapat memperlihatkan hubungan antara pembiayaan dengan capaian yang dapat dihasilkan. Tidak hanya untuk membantu evaluasi penggunaan anggaran, hasil analisis PEA juga dapat membantu perencanaan program dan kegiatan di suatu wilayah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dan tidak tumpang tindih.



Kemampuan dan efektivitas perangkat PEA membuat pemerintah Kabupaten Alor melalui Pokja AMPL telah mengadopsi PEA sejak tahun 2011. Perangkat analisis ini dinilai sangat mudah dan sederhana untuk diterapkan. Hasil kajian perangkat ini jelas dan mudah dipahami karena dapat ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel. (Sumber foto: UNICEF)

Sesuai hasil PEA, pemerintah Kabupaten Alor dapat mengetahui bahwa realisasi pembangunannya dalam 5 tahun terakhir sudah menggunakan anggaran hampir mencapai Rp 121 milyar. Walau lebih rendah dari rencana anggaran yang besarnya lebih dari Rp. 155 milyar, kabupaten itu sudah berhasil mencapai peningkatan akses air dan sanitasi sebagaimana diharapkan. Akses air minum sudah mencapai 88,40% dari target 82% sedangkan akses sanitasi telah mencapai 85,23% dari target 76%. Dari kajian ini juga diketahui bahwa tiap tahunnya capaian pilar 1 STBM “Stop Buang Air Besar Sembarangan” sudah mengalami peningkatan.

Target Capaian Akses dan Anggaran AMPL Kabupaten Alor 2011 – 2015

Tahun	Target capaian akses		Anggaran	
	Air Minum	Sanitasi	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2011	59,75%	27,18%	26.203.676.979	24.983.943.839
2012	65,31%	39,39%	28.570.830.125	15.632.508.565
2013	70,88%	51,59%	31.140.895.967	40.917.403.233
2014	76,44%	63,80%	34.026.935.042	19.614.506.894
2015	82,00%	76,00%	36.688.464.847	19.817.281.104
Jumlah			156.630.505.958	120.965.643.635

Sumber data: Laporan Public Expenditure Analysis Kabupaten Alor Tahun 2016

Banyak kesimpulan lain yang dihasilkan melalui Kajian Belanja Publik atau PEA ini. Misalnya, dari total realisasi anggaran tahun 2011-2015, hanya 31,60% berasal dari APBD murni Kabupaten Alor. Walau demikian, pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola 83,66% dari total anggaran tersebut. Artinya, ada anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Alor. Pemerintah pusat sebagai sumber anggaran terbesar hanya berwenang untuk mengelola 12,95% dari total anggaran.

PEA di Kabupaten Alor juga menyimpulkan bahwa 54,05% dari total realisasi anggaran dikelola oleh lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat. Dari aspek jenis program, pembiayaan lebih diprioritaskan untuk program air minum dan air bersih (69,34%), baru selanjutnya untuk program sanitasi (23,71%) dan penguatan kapasitas (6,86%). Diketahui juga bahwa 91% realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana AMPL. Diketahui juga kemudian bahwa 88,8% anggaran digunakan pada jenjang desa. Dari aspek penerima manfaat, rumah tangga dan masyarakat menerima 92,48% dari total realisasi anggaran.

Hasil PEA tiap tahunnya dituangkan dalam laporan resmi yang kemudian dibagikan kepada instansi-instansi terkait, DPRD, pemerintah provinsi, selain juga dikirimkan ke pemerintah pusat. Dengan demikian, kinerja pembangunan AMPL di Kabupaten Alor dapat tersosialisasi dengan baik. Semua pihak juga dapat mengetahui efektivitas penggunaan anggaran pembangunannya. Hasil PEA juga telah digunakan sebagai bahan advokasi kepada pengambil kebijakan.

Terobosan yang dilakukan di Kabupaten Alor ini sudah selayaknya dapat dilakukan di daerah-daerah lainnya. Sebagaimana yang sudah dilakukan Aisyah Aga Ima, Fasilitator Kelembagaan program WASH di Kabupaten Alor, para Fasilitator Kelembagaan di daerah-daerah lain diharapkan dapat memperkenalkan dan mendorong penggunaan perangkat PEA di wilayah kerjanya masing-masing. Kemampuan persuasi dari para fasilitator sangat dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah setempat agar mau menggunakan perangkat ini.

STRATEGI ADVOKASI TEPAT, MASALAH ANGGARAN TERATASI

Keterbatasan alokasi anggaran merupakan masalah yang sering dijumpai oleh para pelaku sanitasi di daerah. Tidak selalu akibat ketidakadaan uang, keterbatasan itu juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan para pejabat anggaran tentang upaya peningkatan perilaku sanitasi. Disinilah, peran fasilitator dibutuhkan untuk mengadvokasi para pejabat tersebut. Dengan strategi advokasi yang efektif, misalnya dengan mengajak mereka melihat langsung daerah lain yang lebih baik, masalah anggaran dapat diatasi.

Dukungan regulasi terhadap urusan sanitasi di Provinsi Papua sebenarnya sudah cukup kuat. Walau demikian, alokasi anggaran pemerintah untuk urusan kesehatan lingkungan tetap saja rendah. Tidak heran jika cakupan sanitasi di provinsi tersebut belum dapat meningkat secara signifikan. Bukan disebabkan oleh tidak adanya uang, masalah keterbatasan alokasi anggaran sanitasi di provinsi tersebut sebenarnya lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat

pemahaman para pengambil keputusan terhadap urusan sanitasi. Pimpinan Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi lebih cenderung mengalokasikan anggaran kesehatannya untuk pembangunan fasilitas kesehatan atau untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.



Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Sorong Selatan merupakan hasil advokasi dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi Papua Barat. (Sumber foto: UNICEF)

Advokasi perlu dilakukan oleh para staf sanitasi ke pimpinannya dan juga ke para pengambil keputusan anggaran. Strategi dan materi advokasi disusun para staf dibantu Fasilitator Kelembagaan Provinsi Papua, Adiyoga untuk kemudian dipresentasikan ke para pimpinan instansi kesehatan. Sayangnya, upaya advokasi tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Strategi advokasi lain kemudian disepakati.



Salah satu strategi advokasi yang efektif adalah melalui horizontal learning atau para pejabat di satu daerah melihat langsung hasil pembangunan sanitasi di daerah lain. Melalui cara ini, pejabat akan terinspirasi untuk menerapkannya di daerahnya sendiri. Kunjungan lapangan demikian merupakan salah satu jenis kegiatan advokasi yang sering memberikan hasil yang efektif. (Sumber foto: UNICEF)

Atas dukungan program WASH UNICEF, beberapa pejabat Bappeda provinsi, instansi kesehatan dan instansi-instansi lain diundang untuk mengunjungi Kabupaten Biak Numfor (Provinsi Papua) selama 3 hari di bulan Februari 2015. Mereka diajak untuk melihat langsung salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Papua dalam pelaksanaan STBM. Dua distrik di Kabupaten Biak Numfor sudah telah mendeklarasikan dirinya sebagai Distrik STBM. Hasilnya sangat baik. Sekretaris Bappeda saat itu, Adolof Kambuaya sangat terkesan dan yakin bahwa upaya pembangunan sanitasi di Kabupaten Biak Numfor sebenarnya sangat sesuai dengan visi dan misi Gubernur Papua. Pendekatan STBM dirasakan sebagai program yang sungguh-sungguh mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan sanitasi dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

“ *Ajak pihak-pihak berkepentingan untuk melihat langsung daerah lain yang sudah berhasil mempromosikan perilaku sanitasi ke masyarakatnya. Kunjungan demikian seringkali sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan.*

Sejak kunjungan advokasi itu, urusan sanitasi di Provinsi Papua bagai mendapat angin baru. Bappeda menginginkan STBM untuk masuk dalam rencana pembangunan bidang sosial-budaya di setiap kabupaten dan kota Provinsi Papua. Rapat koordinasi pembangunan diadakan untuk menginspirasi wakil-wakil Bappeda kabupaten dan kota agar mau merencanakan STBM di daerahnya masing-masing. Template RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) untuk pelaksanaan STBM dibagikan ke para peserta untuk membantu mereka merencanakan anggaran daerahnya. Dengan adanya pemahaman lebih baik dari para pejabat Bappeda kabupaten dan kota, usulan kegiatan dan anggaran terkait STBM akan lebih mudah untuk disetujui

Beberapa lama kemudian hal ini mulai menunjukkan hasil. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua telah memiliki anggaran sendiri untuk mengimplementasikan STBM. Melalui kolaborasi dengan mitra lokal seperti Wahana Visi Indonesia, Yayasan Rumsram, Yayasan Noken Papua dan Yayasan Hiroso Papua, pemerintah kabupaten tersebut mendorong 60 kampung yang berhasil mendeklarasikan kampungnya sebagai kampung SBS atau STBM, di wilayah Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor, Supiori dan Keerom.



PENGEMBANGAN KAPASITAS

DIDATANGI LANGSUNG AGAR MAU BERUBAH

Butuh strategi khusus untuk mengubah kebiasaan buang air besar (BAB) masyarakat. Apalagi jika kebiasaan itu sudah berlangsung sepanjang hidupnya. Tidak hanya perlu ditingkatkan kesadarannya, masyarakat juga perlu diberi perhatian khusus dan tekanan sosial agar mau membiasakan diri BAB di jamban. Pilihan tekanannya beragam, tergantung kesepakatan di antara masyarakat dan pemerintah setempat. Misalnya, didatangi rumahnya dan diberi penjelasan lengkap tentang kebiasaan BAB mereka yang perlu diubah.

Pengalaman menarik dialami oleh para kader kesehatan di Kecamatan Katala Hamu Linu (KAHALI) yang terletak di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Camat setempat, Thomas Peka Rihi memiliki cara yang tidak biasa dalam memicu warganya untuk menerapkan PHBS di keseharian mereka. Langkahnya dengan membentuk Tim Tusuk Lubang Jamban dinilai unik

dan efektif. Tim itu bertugas untuk melakukan pendekatan kepada warga agar mau meninggalkan kebiasaan BABS.

Tim Tusuk Lubang Jamban turun langsung mendatangi rumah-rumah di wilayah kecamatan tersebut. Semua didatangi, termasuk rumah yang tidak memiliki jamban dan rumah yang sudah jambannya belum dimanfaatkan oleh penghuninya. Bagi rumah-rumah yang jambannya belum dimanfaatkan, tim akan memasang bendera hitam di depan rumahnya. Maksudnya memang untuk membuat malu pemilik rumah. Untuk rumah-rumah yang belum memiliki jamban, kecamatan akan membantu pembangunan jambannya melalui wirausaha sanitasi dan alokasi dana desa (ADD). Tanpa waktu lama, langkah itu berhasil membuat Kecamatan KAHALI menjadi kecamatan pertama yang sukses melakukan deklarasi SBS. Lebih dari itu, KAHALI juga dianggap sebagai kecamatan percontohan dalam mendorong capaian 100% akses sanitasi di Kabupaten Sumba Timur.

Sementara itu, lain lagi yang dijumpai di Desa Lawahing, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seorang sanitarian di desa itu, Maria Kalau menjalankan program Klinik Sanitasi dengan mendatangi langsung rumah pasien-pasien Puskesmas yang memiliki keluhan diare, muntaber atau penyakit sanitasi lainnya. Sebagai staf Puskesmas, dia memiliki akses terhadap data pasiennya. Setelah menilai kondisi sanitasi di rumah pasien tersebut, Maria akan memberikan penjelasan tentang manfaat perilaku bersih dan sehat. Mulai dari mencuci tangan pakai sabun, mengolah air limbah dan sampah rumah dengan benar, sampai menjaga kebersihan jamban. Selain mendatangi rumah-rumah, Maria juga aktif mendatangi sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah untuk mempromosikan perilaku bersih dan sehat. Kerja nyata Maria ini diakui turut berkontribusi terhadap keberhasilan Desa Lawahing menghilangkan praktek BABS. Kesadaran sanitasi

warga desa sudah meningkat jauh. Mereka kini secara rutin bergotong royong untuk menjaga sarana sanitasi yang dimiliki. Mereka juga tidak ragu untuk saling mengingatkan dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.



Maria Kalau (sebelah kiri) di Desa Lawahing, Kabupaten Alor, memantau kondisi sanitasi lingkungan masyarakat desanya dengan menggunakan kantong kunjungan rumah. (Sumber foto: UNICEF)

“

*Beri perhatian personal ke anggota masyarakat.
Dengan adanya perhatian khusus, mereka akan lebih terbuka terhadap berbagai saran dan masukan.
Mereka juga akan lebih terdorong untuk memperbaiki perilaku sanitasinya.*

Mengubah perilaku hidup masyarakat memang tidak mudah. Butuh ketekunan dan langkah-langkah inovatif untuk membuat masyarakat mau mendengar dan menyadari kekurangannya. Yang patut diingat adalah masyarakat pada dasarnya akan berubah jika diberi perhatian khusus. Fasilitator sanitasi dapat mengambil pelajaran dari langkah jitu yang dilakukan di kedua desa di atas dan mencoba memfasilitasi penerapannya di desa-desa lainnya di Indonesia.

VERIFIKASI DAN DEKLARASI UNTUK NAIKKAN MOTIVASI

Ada dua kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk memotivasi desa-desa bekerja lebih keras menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) warganya. Satu, verifikasi data BABS. Mendengar akan ada verifikasi, para aparat desa biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang di lapangan sekaligus mengingatkan warga yang masih mempraktekkan BABS. Kedua, kegiatan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Suatu desa akan tergugah jika diajak melihat acara deklarasi SBS dari desa tetangganya yang sudah bebas BABS.

Pengaruh dari kegiatan verifikasi dan deklarasi itu terjadi di Kabupaten Luwu Utara (Provinsi Sulawesi Selatan). Sejak program STBM dicanangkan di tahun 2011, Kabupaten Luwu Utara yang memiliki 12 kecamatan itu berkomitmen untuk menjadikan seluruh desanya terbebas dari perilaku BABS di tahun 2019. Pihak-

pihak terkait sudah sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk berkolaborasi memenuhi komitmen itu. Termasuk di antaranya Bupati, Wakil Bupati, para anggota DPRD, para pimpinan instansi pemerintah, camat, lurah dan kepala Puskesmas. Targetnya, minimal “Satu desa per satu Puskesmas per satu tahun”. Diseminasi STBM dilakukan di 10 Kecamatan dengan melibatkan anggota Pokja AMPL dan pelaku-pelaku STBM setempat. Sayangnya, hanya 11 desa di ke-10 kecamatan itu yang di tahun 2013 sudah terbebas dari perilaku BABS.



Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mengejar akses universal dibidang sanitasi ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Luwu Utara yang mensyaratkan alokasi dana desa untuk STBM. Foto diatas adalah salah satu kegiatan sosialisasi peraturan bupati tersebut. (Sumber foto: UNICEF)

Terbitnya Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Desa dan Kelurahan Sehat di tahun 2014 memang membantu. Desa-desa mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk urusan sanitasi. Walau demikian, adanya rencana untuk melakukan verifikasi desa SBS di tahun 2016 ternyata juga mendorong desa-desa untuk lebih bekerja keras. Verifikasi 30 desa yang dilakukan Dinas Kesehatan ini akan memastikan terjadinya perubahan perilaku warga untuk tidak lagi melakukan BABS dan menilai tingkat kepemilikan jamban. Verifikasi juga dilakukan terhadap desa-desa yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya. Dengan adanya verifikasi, banyak desa termotivasi untuk mengejar target status desa SBS. Sebelum verifikasi dilakukan, para aparat desa dan para pekerja sanitasi biasanya akan turun langsung melakukan pemeriksaan ulang ke rumah-rumah warga sekaligus mengingatkan warga yang masih mempratekkan BABS.



Deklarasi SBS untuk 27 desa dan satu kelurahan di Kabupaten Luwu Utara dihadiri oleh Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriyani (tengah) di bulan Desember 2016. Deklarasi SBS merupakan wujud apresiasi kepada pemerintah desa dan kelurahan yang telah mengajak masyarakat berperilaku bersih dan sehat di bidang sanitasi. (Sumber foto:UNICEF)



Tidak semua merasa nyaman jika kondisi wilayahnya dinilai pihak lain. Tidak semua juga merasa nyaman jika wilayah lain mendapat pengakuan lebih baik dari wilayahnya. Manfaatkan hal tersebut untuk mendorong pemerintah setempat untuk berupaya lebih keras dalam meningkatkan kondisi sanitasinya.

Deklarasi SBS dilakukan kemudian untuk desa-desa yang sudah diverifikasi terbebas dari perilaku BABS. Deklarasi ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah kabupaten ke desa-desa SBS tersebut. Tidak hanya mengundang kepala-kepala desa yang berhasil membuat desanya terbebas dari BABS, acara deklarasi ini juga menghadirkan desa-desa lain yang belum terbebas dari BABS. Dapat diduga bahwa kemudian acara ini akan menjadi terapi kejut bagi desa-desa yang belum terbebas dari BABS. Para kepala desanya akan terdorong untuk menjadikan daerahnya menjadi lebih baik sehingga dapat dideklarasikan bebas BABS di tahun-tahun selanjutnya.

KESADARAN TUMBUH, PELUANG USAHA TUMBUH

Saat masyarakat sadar untuk tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan, mereka tentunya membutuhkan keberadaan jamban di rumah-rumahnya. Peluang usaha pembangunan jamban pun muncul dengan sendirinya. Di beberapa desa, peluang ini disambut baik oleh sebagian warganya. Merekapun dilatih membuat kakus jongkok, selain dilatih berwiraswasta yang lebih baik. Para wirausahawan sanitasi ini juga kemudian berperan dalam menyebarkan pesan-pesan perilaku bersih dan sehat.

Di Desa Lawahing, Kabupaten Alor, Provinsi NTT ada Imanuel Oduuil seorang sanitarian Puskesmas yang juga kemudian berperan sebagai wirausahawan sanitasi. Imanuel mengaku mendalami profesi tersebut karena ingin membantu warga Lawahing agar bisa memiliki sarana sanitasi yang layak dan terjangkau. Setelah



Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan beberapa warga desa agar dapat menjadi tenaga wirausaha sanitasi yang baik. Pelatihan lebih banyak ditekankan ke aspek praktek, khususnya dalam membuat jamban sehat dan kakus jongkok. (Sumber foto: UNICEF)

mengikuti pelatihan yang didukung oleh Program WASH, Imanuel pun aktif membuat dan mempromosikan jamban yang dia buat sendiri.

Satu kloset dijual dengan harga Rp.70 ribu saja, namun untuk membantu warga tidak jarang Imanuel juga menggratiskannya. Dia tidak terlalu khawatir, karena jika ada satu keluarga saja yang membayar itu sudah bisa menutupi biaya untuk membuat tiga kloset lainnya. Yang penting baginya, masyarakat sudah tidak BABS lagi.

Sementara itu, di daerah lain tepatnya di Desa Atengmelang ada tenaga wirausaha sanitasi lain bernama Jhon Elkana yang sudah membuat dan memasarkan puluhan kloset jongkok. Jhon sangat beruntung, karena pemerintah desa membantu pembelian membeli kloset untuk warga-warga tidak mampu. Harganya Rp. 150 ribu per buah. Kolaborasi Jhon

dan pemerintah desa pun berjalan dengan baik dan terbukti berhasil mendukung peningkatan akses sanitasi layak di wilayah mereka.

Demikian juga cerita dari wirausaha sanitasi di desa Likuwatang. Setelah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor atas dukungan Unicef, Maxi memulai usahanya dengan memproduksi kloset jongkok. Saat ini dia telah berhasil membuat dan memasarkan puluhan kloset dengan melibatkan sembilan orang warga lain. Agar kloset buaatannya lebih menarik, Maxi sudah membeli kompresor untuk mengecat kloset buaatannya. Dia juga berencana melebarkan usahanya, sehingga nantinya bisa memenuhi pesanan kloset dari desa lain di luar Likuwatang.

“ *Libatkan mereka yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha di bidang sanitasi. Mereka sangat berkepentingan terhadap perubahan perilaku sanitasi masyarakat di sekelilingnya. Di saat kebutuhan masyarakat terhadap jamban sehat meningkat, penghasilan mereka pun akan meningkat.*

Menurut para tenaga wirausaha sanitasi, profesi ini sangatlah menguntungkan. Bukan hanya mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah saja, sebagai wirausaha sanitasi mereka juga dapat turut membantu warga desanya untuk memiliki sarana sanitasi layak. Sebagaimana dirasakan langsung oleh Fasilitator Kelembagaan Kabupaten Alor, Aisyah, keberadaan para wirausaha sanitasi ini sangat membantu tugasnya dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Peran wirausaha sanitasi dalam mendorong peningkatan akses layanan sanitasi rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi.



PENUTUP

ADA PERAN FASILITATOR UNTUK MENDORONG KEBERHASILAN

Jika tidak ada yang mengadvokasi, belum tentu pimpinan daerah mau mendukung. Jika tidak ada yang terus mengajak, belum tentu masyarakat mau terlibat. Jika tidak ada yang mengatur, belum tentu pertemuan antar pihak akan terjadi. Jika tidak ada yang mengingatkan, belum tentu semua pihak akan menepati komitmen dan janjinya. Itulah sebagian tugas Fasilitator Kelembagaan program WASH. Dia harus memastikan proses peningkatan perilaku sanitasi berjalan lancar dan mencapai sasaran bersama. Butuh pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk menjadi fasilitator yang baik, selain butuh kesabaran dan ketangguhan. Pengalaman para fasilitator ini harus dijadikan pelajaran berarti bagi fasilitator-fasilitator lainnya.

Ada banyak tantangan yang dijumpai para Fasilitator Kelembagaan Program WASH. Harus tinggal di daerah yang namanya mungkin belum pernah mereka dengar sebelumnya. Harus meyakinkan pimpinan daerah dan masyarakatnya yang mungkin

tidak selalu menerima mereka dengan baik. Harus menjadi jembatan komunikasi antar pihak-pihak berkepentingan dan mengupayakan kolaborasi di antara pihak-pihak tersebut.



Fasilitator harus mampu berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, sanitarian, tokoh agama, tokoh LSM, guru, aparat pemerintah, tentara dan polisi, kepala desa, lurah, camat sampai bupati. Fasilitator harus memiliki banyak kemampuan. Mulai dari kemampuan teknis, administrasi, keuangan sampai kemampuan berkomunikasi, advokasi, pendampingan dan wirausaha. (Sumber foto: UNICEF)

Kendati begitu, banyak fasilitator yang sudah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Berbagai tantangan berhasil diatasi, kolaborasi antar pihak berkepentingan berhasil diwujudkan dan pada akhirnya desa-desa di kecamatannya sudah berhasil meraih status bebas dari BABS. Jika desanya belum bebas BABS-pun, para fasilitator setidaknya sudah berhasil mendorong adanya pengurangan BABS yang signifikan. Mereka setidaknya berhasil menciptakan iklim yang lebih kondusif

(*enabling environment*) untuk mendukung kegiatan STBM. Termasuk dari segi dukungan politis, regulasi, institusional, koordinasi maupun finansial. Untuk para fasilitator, semua hal di atas akan memberikan kebahagiaan tersendiri.



Pertemuan sanitarian dan fasilitator STBM mitra Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura di Tahun 2015. (Sumber foto: UNICEF)

Contohnya para fasilitator sanitasi kecamatan yang bertugas di Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Di antaranya ada Muhammad Rizal Subhan, fasilitator di Kecamatan Pantar Timur yang mengaku sangat senang dengan capaian wilayahnya. Ada 8 desa dari 11 desa di kecamatannya yang sudah berhasil melakukan deklarasi Stop BABS. Ada juga Daud Lapenangga di Kecamatan Alor yang senang karena kondisi stop BABS di desa Maritaing telah kembali pulih, setelah daerah tersebut dilanda musibah gempa yang merusakkan sejumlah sarana.

Fasilitator di Kecamatan Alor Tengah Utara, Mando Kolimon berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat berkat strategi komunikasinya yang baik. Dia banyak memanfaatkan forum-forum pertemuan warga, termasuk pertemuan tingkat desa dan kecamatan, acara peribadatan, pertemuan adat dan acara silaturahmi warga.

“ *Keberhasilan seorang fasilitator tidak terlepas pula dari kerja keras pemerintah di wilayah kerjanya. Seorang fasilitator hanya bertugas untuk membantu pemerintah setempat. Berhasil atau tidaknya wilayah itu meningkatkan kondisi sanitasinya lebih ditentukan oleh upaya aparat pemerintah setempat yang berkaitan dengan urusan sanitasi.*

Di daerah lainnya, yaitu Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitator kelembagaan program WASH di kabupaten tersebut, Darwis merasa senang dengan keberhasilan aparat desa Sepee untuk bersinkronisasi dengan satuan Komando Rayon Militer 1405-06 (Kecamatan Barru) untuk pengadaan jamban bagi warga desa itu. Darwis juga merasa bahagia karena sudah turut mendampingi camat Soppeng Riaja, Charlly Fischer sampai menjadi tokoh STBM yang dikenal banyak orang.

Fasilitator di Kabupaten Luwu Utara, Samri To Ngili dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak berkepentingan dapat bersinergi dengan baik jika ada pihak yang mau menjadi jembatan komunikasi di antara mereka. Itulah yang berhasil mereka lakukan setelah sebelumnya bergerilya ke beberapa instansi terkait dan pengelola-pengelola program sejenis. Fasilitator Samri juga berhasil mendorong terbitnya peraturan bupati

setempat yang mewajibkan pemerintah desa untuk memanfaatkan alokasi anggaran pembangunan desa untuk sektor air minum dan sanitasi.

Keberhasilan mendorong terbitnya peraturan setempat juga diraih oleh fasilitator-fasilitator lainnya. Misalnya, Wisnu Wardhana yang mendampingi pihak-pihak berkepentingan di provinsi NTT sampai terbitnya Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih. Atau, Adiyoga di Provinsi Papua dalam penerbitan Peraturan Gubernur Papua tentang rencana strategis pembangunan layanan air minum dan penyehatan lingkungan. Prosesnya memiliki ceritanya masing-masing tetapi peran fasilitator jelas terlihat di belakang proses itu semua. Mengatur pertemuan, membuat catatan hasil pertemuan, mengingatkan dan menagih janji pihak berkepentingan sampai menyusun draft peraturan.

Sementara itu, Febriansyah di Papua Barat mendorong terobosan dengan melakukan advokasi ke Kepala Seksi Dinas Kesehatan Se-Papua Barat sebagai upaya untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi. Hasilnya pun berhasil, dimana ada 11 kabupaten yang langsung berkomitmen untuk meningkatkan kondisi air minum dan sanitasi di wilayahnya.

Walau merasa senang dan bangga, semua fasilitator sepakat bahwa keberhasilan-keberhasilan itu lebih ditentukan oleh keaktifan pihak-pihak setempat yang terlibat dalam kegiatan STBM, khususnya para pejabat dan petugas pemerintah setempat. Para fasilitator juga menyadari bahwa mereka dapat bekerja berkat bimbingan dan masukan dari mitra-mitra lokalnya. Misalnya, para sanitarian Puskesmas yang dengan sabar membimbing para fasilitator baru. Peran Pokja AMPL Nasional dan pemerintah pusat juga sangat besar

dalam memberikan arahan dan masukan bagi para fasilitator dan aparat pemerintah setempat.

Dedikasi, kerja keras dan kerjasama seluruh pihak berkepentingan sangat mendukung tercapainya target 100% akses sanitasi di tahun 2019. Cerita-cerita dalam buku ini diyakini akan meningkatkan motivasi kerja para fasilitator di kemudian hari, selain juga membuat mereka bekerja dengan lebih cerdas.

Daftar Singkatan

AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBN/APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB	: Buang Air Besar
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
NTT	: Nusa Tenggara Timur
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PEA	: <i>Public Expenditure Analysis</i>
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
RAD API	: Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
RKP/RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN/RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SBS/ODF	: Stop Buang Air Besar Sembarangan/ <i>Open Defecation Free</i>
SLBM	: Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TOT	: <i>Training of Trainers</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i>